

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir, Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Apeldoorn, Van., 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua Puluh Empat, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Arba, H.M., 2015, *Hukum Agraria Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam D, 1982, *Perjanjian Kredit Bank*, Ct. III, Alumni, Bandung.
- Bahsan, M., 2002, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta.
- Guse, Prayudi, 2007, *Seluk-beluk Perjanjian yang Penting untuk Diketahui Mulai dari A-Z*, Pustaka Pena, Yogyakarta.
- Harahap, Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hernoko, Agus Yudha, 2010, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hutagalung, Arie S, 1998, *Hukum Kontrak di Indonesia (Masalah-masalah Yuridis Praktis dalam Persiapan Kontrak Bisnis dan Hubungannya dengan Pelaksanaan Kontrak Tersebut)*, Elips, Jakarta.
- H.S, H. Salim, 2017, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- , *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, 1993, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Panggabean, H.P, 2010, *Penyalahgunaan Keadaan (Misburuik van Omstandigheden), sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda dan di Indonesia)*, Liberty, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rozak, 2008, *Kodifikasi Materi Hak Tanggungan*, Citra Karya, Jakarta.
- Setiawan, R., 1987, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sofyan, Sri Soedewi Masjchoen, 1974, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Widjaja, Gunawan Kartini Muljadi, 2006, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- , *Hak Tanggungan Seri Hukum Kekayaan*, 2006, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta.

## Jurnal

- Buana, Mirza Satria, 2010, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Susanti, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Temanggung Unit Kandungan)*, Skripsi, Program Sarjana Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Wantu, Fence M., 2007, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KHPerdata);

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1112;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 686;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 569 .

## **Internet**

Dwika, “*Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum*”, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 18 Januari 2020.

## **Lain-lain**

Kebijakan Perkreditan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Filosofi Perkreditan Bank Mandiri, Edisi 3, Tahun 2018.

Standar Prosedur Operasional – Pekreditan Credit Operations Wholesale, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Revisi Januari 2020, Tahun 2020.

Laporan Industri Perbankan Triwulan I Tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Edisi I, Tahun 2019.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, “*Kinerja Tahunan Bank Mandiri*”, <https://www.bankmandiri.co.id/web/guest/profil-perusahaan>, diakses 23 Januari 2020.

Turnadi, Wibowo, “*Asas-asas Perjanjian*”, <http://www.jurnalhukum.com/asas-asas-perjanjian/2012>, diakses 26 Januari 2020.

## **Pidato**

Djalil, Sofyan, “*Softlaunching Implementasi Peraturan Menteri Agraria & Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2019*”, Pidato, Implementasi Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik Kementerian ATR/BPN, Jakarta, 4 September 2019.

Windayana, Suyus, “*Softlaunching Implementasi Peraturan Menteri Agraria & Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2019*”, Pidato, Implementasi Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik Kementerian ATR/BPN, Jakarta, 4 September 2019.

## LAMPIRAN

1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 686).
2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1112.
3. Materi Sosialisasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik oleh Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (*keynote speaker*: Bpk. Ir. Suyus Windayana, M. App. Sc).
4. Materi Layanan Elektronik dalam Mendukung Transfromasi Kementerian ATR/BPN Menuju Era Digital oleh Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (*keynote speaker*: Bpk. Ir. Suyus Windayana, M. App. Sc).
5. Materi Layanan Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Administrasi Pertanahan di Indonesia oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (*keynote speaker*: Bpk. Ir. Virgo Eresta Jaya, M.Eng. Sc).
6. Materi Sosialisasi HT-*el* berjudul Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang

Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik oleh Credit

Operations Group PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.